



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 3/M.PPN/HK/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 - b. bahwa dalam rangka memastikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dapat dipahami dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka perlu dilakukan sinkronisasi/integrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tanggung jawab mendesiminasikan, menginternalisasi dan menjamin implementasi RPJPN 2025-2045 di daerah;
 - d. bahwa ketentuan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan momentum revitalisasi peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan di daerah;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut Tim Penyelarasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Pendamping, dan Tim Dukungan Teknis Penyelarasan.
- KETIGA : Tim Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas Fasilitasi, Koordinasi dan Asistensi (FKA).
- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan, dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan baik teknis maupun non teknis dalam rangka penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Anggota.
- KETUJUH : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas untuk:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pendampingan kepada Provinsi dalam rangka penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - b. menyusun modul pelaksanaan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2025-2045;

- c. melakukan supervisi pelaksanaan penyeselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 berdasarkan dokumen Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyeselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
- d. mendukung kebutuhan Tim Penyeselarasan dalam penyelenggaraan penyeselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEDELAPAN : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator, Wakil Koordinator, dan Tim Provinsi serta didalamnya termasuk juga kelompok pengajar/fasilitator yang merupakan para pengajar/fasilitator yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.
- KESEMBILAN : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mengajar, memfasilitasi, dan/atau memberikan asistensi, serta mendampingi pemerintah daerah dengan berdasarkan panduan pelaksanaan penyeselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Tim Dukungan Teknis Penyeselarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KESEBELAS : Tim Dukungan Teknis Penyeselarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH bertugas mendukung setiap proses penyelenggaraan penyeselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
- KEDUABELAS : Anggota Tim Dukungan Teknis Penyeselarasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dapat berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGABELAS : Ketentuan mengenai Tim Penyeselarasan diatur oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Penanggung Jawab Tim Penyeselarasan.

KEEMPATBELAS : ...

- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelarasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Januari 2024.

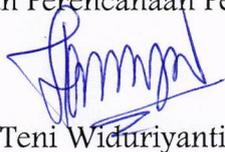
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Teni Widuriyanti

ai.

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 3/M.PPN/HK/01/2024
TANGGAL 23 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045

A. TIM PENGARAH

Ketua I : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketua II : Menteri Dalam Negeri.

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

B PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua III : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan

- Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
 6. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PENDAMPING

- Koordinator Tim : Taufik Hanafi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator Tim : Himawan Hariyoga Djojokusumo, Kementerian PPN/Bappenas.
- Tim Provinsi :
- Koordinator Wilayah Sumatera : Arifin Rudiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pendamping Wilayah Sumatera :
1. Rendy Jaya Laksamana, ST, MM, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Ir. Gunawan, M.Si, Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
 3. Efin Mei Aniffiyan, ST, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 4. Yudith Aldila Asokawati, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
- a. Provinsi Aceh :
1. Taufik Hanafi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Muhammad Iqbal Abbas, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Proyek Prioritas, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di

Wilayah Sumatera.

6. Bintang Rahmat Wananda, Kementerian PPN Bappenas.
- b. Provinsi Sumatera Utara :
1. Leonard VH Tampubolon, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Hayu Parasati, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Bintang Rahmat Wananda, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Provinsi Sumatera Barat :
1. Leonard VH Tampubolon, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Erianti Puspa, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Bintang Rahmat Wananda, Kementerian PPN/Bappenas.
- d. Provinsi Riau :
1. Arifin Rudiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Erianti Puspa, Kementerian PPN/Bappenas.

3. Direktur ...

3. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Bintang Rahmat Wananda, Kementerian PPN/Bappenas.
- e. Provinsi Kepulauan Riau :
1. Arifin Rudiyanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Emmy Soeparmijatun, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Informasi Pembangunan Daerah Kementen Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Bintang Rahmat Wananda, Kementerian PPN/Bappenas.
- f. Provinsi Sumatera Selatan :
1. Subandi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Darmawijaya, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi

- Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
6. Rani Murweng Pramesti, Kementerian PPN/Bappenas.
- g. Provinsi Bengkulu :
1. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Agus Manshur, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Fidelia Silvana, Kementerian PPN/Bappenas.
- h. Provinsi Jambi :
1. Taufik Hanafi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Agus Manshur, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Fidelia Silvana, Kementerian PPN/Bappenas.
- i. Provinsi Bangka Belitung :
1. R. Anang Nugroho Moeljono, Kementerian PPN/Bappenas.

2. Guntur Pawoko, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Rani Murweng Pramesti, Kementerian PPN/Bappenas.
- j. Provinsi Lampung :
1. R. Anang Nugroho Moeljono, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Darmawijaya, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Sumatera.
 6. Fidelia Silvana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Koordinator Wilayah Kalimantan
- Pendamping Wilayah Kalimantan :
- Roni Dwi Susanto, Kementerian PPN/Bappenas.
1. Mohammad Samsulrizal Muttaqien, SE, M.Si, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Mirzal, SKM, MACD, Direktorat Perencanaan,

Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.

3. Hanz Budi Setiawan Dandel, SE., M.AP, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
4. Kelvin, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.

k. Provinsi Kalimantan Barat :

1. M. Iqbal Abbas, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Eko Wiji Purwanto, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Info Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
6. Arief Wiroyudo, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Dwita Widyaningsih, Kementerian PPN/Bappenas.

l. Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Siqdy Lego Pangesthi Suyitno, Kementerian PPN/Bappenas.
2. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
6. Santi Yulianti, Kementerian PPN/Bappenas.
- m. Provinsi Kalimantan Selatan :
1. Subandi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Arif Haryana, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Raditya Pranadi, Kementerian PPN/Bappenas.
- n. Provinsi Kalimantan Timur :
1. Hayu Parasati, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Salusra Widya, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Anang Budi Gunawan, Kementerian PPN/Bappenas.
- o. Provinsi Kalimantan Utara :
1. Roni Dwi Susanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, Kementerian

- PPN/Bappenas.
3. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Awan Setiawan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Koordinator Wilayah Bali-
Nusa Tenggara
- Pendamping Wilayah Bali- :
Nusa Tenggara
- I Dewa Gde Sugihamretha, Kementerian PPN/Bappenas.
 1. Drs. Sofyan, M.Si, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Harry Irawan, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
- p. Provinsi Bali :
:
1. I Dewa Gde Sugihamretha, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Wariki Sutikno, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Jayadi, Kementerian PPN/Bappenas.

- q. Provinsi Nusa Tenggara Timur :
1. Salusra Widya, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Eko Wiji Purwanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral. Dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Aldy K. Mardikanto, Kementerian PPN/Bappenas.
- r. Provinsi Nusa Tenggara Barat :
1. I Dewa Gde Sugihamretha, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Arif Haryana, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Mas Wedar Haryagung Adji, Kementerian PPN/Bappenas.
- Koordinator Wilayah Jawa Tubagus Achmad Chusni, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pendamping Wilayah Jawa :
1. Bob Ronald Fretsy Sagala, M.Si, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi

- Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
2. Yopy Herlyan Juniaga, ST., MT, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 3. Yudhi Timor Bimo Prakoso, ST., MT, M.Sc, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 4. I Gusti Agung Ngurah W. P., Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
- s. Provinsi Banten :
1. Tubagus Achmad Chusni, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Haryanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Tarina Iqlima, Kementerian PPN/Bappenas.
- t. Provinsi DKI Jakarta :
1. Jadhie Judodiniar Ardajat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Haryanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.

5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Tarina Iqlima, Kementerian PPN/Bappenas.
- u. Provinsi Jawa Barat :
1. Guspika, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Yahya Rachmana Hidayat, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Tarina Iqlima, Kementerian PPN/Bappenas.
- v. Provinsi Jawa Tengah :
1. Subandi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Petrus Sumarsono, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Habibah Nurrohmah, Kementerian PPN/Bappenas.
- w. Provinsi Jawa Timur :
1. Tubagus Achmad Chusni, Kementerian

- PPN/Bappenas.
2. Roni Dwi Susanto, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Jayadi, Kementerian PPN/Bappenas.
- x. Provinsi Daerah Istimewa :
Yogyakarta
1. Hanan Nugroho, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Wisnu Utomo, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Kesejahteraan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali.
 6. Jayadi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Koordinator Wilayah Sulawesi
- Pendamping Wilayah Sulawesi :
1. Wisnu Hidayat, S.E., M.SI., Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Anang ...

2. Anang Indiawan Lastika Putra, SE, M.Si, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 3. Dr. Jiwa Muhamad Satria Nusantara, S.IP., M.A, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 4. Ichsan Aulyansyah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Panggih Pujo Laksono, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
- y. Provinsi Gorontalo :
1. Yahya Rachmana Hidayat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Sri Yanti JS, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Vina Fadhotul Mukaromah, Kementerian PPN/Bappenas.
- z. Provinsi Sulawesi Utara :
1. Oswar Muadzin Mungkasa, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Arif Christiono Soebroto, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur ...

3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Asep Saepudin, Kementerian PPN/Bappenas.
- aa. Provinsi Sulawesi Tengah :
1. Hadiat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Supriyadi, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kepala Kepala Subdit Wilayah III, Dit. PEIPD Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Asep Saepudin, Kementerian PPN/Bappenas.
- ab. Provinsi Sulawesi Barat :
1. Jadhie Judodiniar Ardajat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Eddy Satriya, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah

Kalimantan dan Sulawesi.

6. Erna Gustina Norrista, Kementerian PPN/Bappenas.
- ac. Provinsi Sulawesi Selatan :
1. Oswar Muadzin Mungkasa, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Sri Yanti JS, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Diantha Arafia, Kementerian PPN/Bappenas.
- ad. Sulawesi Tenggara :
1. R. Wrihatnolo, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Emmy Soeparmijatun, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
 6. Syifaa Tresnaningrum, Kementerian PPN/Bappenas.

- Koordinator Wilayah Maluku : Oktorialdi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Pendamping Wilayah Maluku : 1. Bagus Agung Herbowo, ST., MT, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
2. Drs. Suwarli, M.Si, Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
- af. Provinsi Maluku : 1. Oktorialdi, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Supriyadi, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
6. Beby Hanzian, Kementerian PPN/Bappenas.
- ag. Provinsi Maluku Utara : 1. Oswar Muadzin Mungkasa, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Wildawati, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
5. Kepala Subdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
6. Aldy K. Mardikanto, Kementerian PPN/Bappenas ...

PPN/Bappenas.

- Koordinator Wilayah Papua : Himawan Hariyoga Djojokusumo, Kementerian PPN/Kepala Bappenas.
- Pendamping Wilayah Papua :
1. Sondang Lumban Gaol, S.Sos, M.Eng, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 2. Drs. Machmudan, M.Si, Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
 3. Arif Rachman, SE., MM, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
 4. Khoriyah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
- ah. Provinsi Papua :
1. Guspika, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. R.Wrihatnolo, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Daryll Ikhwan, Kementerian PPN/Bappenas.
- ai. Provinsi Papua Barat :
1. Himawan Hariyoga Djojokusumo, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Petrus Sumarsono, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional,

Kementerian ...

Kementerian PPN/Bappenas.

4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Zulfakar, Kementerian PPN/Bappenas.
- aj. Provinsi Papua Barat :
Daya
1. Eddy Satria, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Wariki Sutikno, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Zulfakar, Kementerian PPN/Bappenas.
- ak. Propinsi Papua Tengah :
1. Taufik Hanafi, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Guntur Pawoko, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.

- al. Provinsi Papua Selatan :
6. Daryll Ikhwan, Kementerian PPN/Bappenas.
 1. Budi Hidayat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Bustang, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Ramadian Irvanizar, Kementerian PPN/Bappenas.
- am. Papua Pegunungan :
1. Himawan Hariyoga Djojokusumo, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Budi Hidayat, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
 5. Substansi Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua.
 6. Setiawan Eko Wardany, Staf Kementerian PPN/Bappenas.
- E. TIM DUKUNGAN TEKNIS
- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil ...

- Wakil Ketua II : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas.
4. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Kementerian Dalam Negeri.
11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.
12. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.
13. Koordinator di Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
14. Wiky Witarni. Kementerian PPN/Bappenas.
15. Rita Miranda, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Pandu Pradhana, Kementerian PPN/Bappenas.

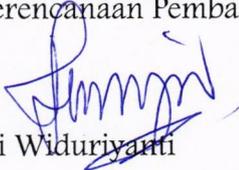
17. Dwi Harini Septaning Tyas, Kementerian PPN/Bappenas.
18. Feita Puspita Murti, Kementerian PPN/Bappenas.
19. Mohamad Iksan Maolana, Kementerian PPN/Bappenas.
20. Jelita Sari Wiedoko, Kementerian PPN/Bappenas.
21. Bernadette Christi Paramitha Santosa, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Luqman Hakim Antris Saputro, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Muhammad Bilhajhusni Widyo Pramana, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


Teni Widuriyanti